

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN DI
DESA KANDANGAN, KECAMATAN KANDANGAN, KABUPATEN
TEMANGGUNG**

TUGAS AKHIR

Oleh:

HERI DWIYANTO

L2D005363



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN DI
DESA KANDANGAN, KECAMATAN KANDANGAN, KABUPATEN
TEMANGGUNG**

Tugas Akhir diajukan kepada
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Oleh:

HERI DWIYANTO

L2D 005 363

Diajukan pada
Sidang Ujian Sarjana
Tanggal 19 Juni 2009

Dinyatakan Lulus/ Tidak Lulus

Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP	Pembimbing
Ir. Sunarti, MT	Penguji 1
Sri Rahayu, Ssi, Msi	Penguji 2

Mengetahui,

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo. CES. DEA
Ketua Panitia Sidang Ujian Sarjana

Dr.rer.nat.Ir. Imam Buchori
Ketua Jurusan

*Bukan Kepintaran
Melainkan Ketekunan dan Kemauan faktor
terpenting.....*

Harapan.....

Usaha.....

Doa.....

Dan Belajar dari Kegagalan.....

Kunci keberhasilan.....

Kupersembahkan untuk Bapak dan Ibu

ABSTRAK

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia ditandai dengan ketidakmerataan dan ketimpangan pembangunan terutama pembangunan di daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Daerah perkotaan ditandai dengan kemudahan mengakses informasi, fasilitas dan sebagai pusat perekonomian, sedangkan daerah pedesaan identik dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Akan tetapi, kenyataannya di tahun 1990an pedesaan tidak terpengaruh dengan adanya krisis ekonomi yang dilihat dari kondisi perekonomian pedesaan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa daerah pedesaan memberikan kekuatan terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional dan pedesaan merupakan salah satu bagian penting yang dapat diperhatikan dalam menentukan arah pembangunan nasional.

Peran pemerintah dalam mendorong pembangunan pedesaan dilakukan dengan menetapkan kebijakan yang tepat dan tindakan yang diwujudkan dengan program nyata pemerintah. Kebijakan dan pelaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah daerah bermuara pada tiga aspek pembangunan pedesaan, yakni terciptanya peningkatan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur dan ekonomi pedesaan. Upaya tersebut pada dasarnya telah dilakukan oleh Kabupaten Temanggung, salah satunya meningkatkan alokasi APBD untuk gerakan membangun dusun/ desa.

Penelitian bertujuan untuk menilai peran pemerintah pada tiap level pemerintah dalam mendorong pembangunan pedesaan, apalagi dengan diberlakukannya otonomi daerah, tiap level pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur pembangunan di daerah otonomnya, seperti pemerintah desa memiliki peran dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarah kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Berkaitan dengan penelitian ini yang mencoba menjelaskan peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan maka metode yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah campuran yakni gabungan dari metode kuantitatif dan kualitatif di mana penelitian kualitatif dilakukan terlebih dahulu baru dilanjutkan penelitian kuantitatif untuk menyimpulkan hasil studi.

Hasil penelitian ini adalah posisi level peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan. Analisis peran pemerintah sebagai penetapan kebijakan dan pelaksana program pembangunan pedesaan dapat menyimpulkan peran pemerintah kabupaten memiliki peran yang tinggi dalam menjalankan perannya baik sebagai regulator dan pelaksana program pembangunan pedesaan. Namun peran pemerintah kabupaten yang dirasakan oleh masyarakat belum begitu mendapatkan dampak yang kuat oleh masyarakat hal ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten masih bersifat pemampu. Kedua, peran pemerintah kecamatan menurut analisis memiliki peran hanya sebagai fasilitator kebijakan maupun pelaksana pembangunan. Hal ini dikarenakan terdapatnya pergeseran fungsi dan kedudukan pemerintah kecamatan. Sedangkan untuk peran pemerintah desa didalam pembangunan pedesaan pada dasarnya memiliki peran sebagai pembuat kebijakan dan sebagai pelaksana program pembangunan, namun dilapangan pemerintah desa lebih cenderung menjalankan fungsi sebagai pelaksana program pembangunan.

Keywords : peran pemerintah, pembangunan, pedesaan, kebijakan dan pelaksana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PRIBADI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Sasaran	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Ruang Lingkup	5
1.6 Keaslian Penelitian	7
1.7 Kedudukan Penelitian	8
1.8 Kerangka Pikir	8
1.9 Metode Penelitian	9
1.9.1 Pendekatan Penelitian	9
1.9.2 Kerangka Analisis	10
1.9.3 Data Penelitian	13
1.9.4 Analisis Data	15
1.10 Sistematika Penulisan	20
BAB II PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN	21
2.1 Pembangunan Pedesaan dalam Pembangunan atau Pengembangan Wilayah	21
2.2 Peran dan Fungsi Pembangunan Pedesaan	23
2.3 Konsep Pembangunan Pedesaan	24
2.4 Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pedesaan	26

2.4.1	Peran Pemerintah sebagai Regulator	26
2.4.2	Peran Pemerintah sebagai Pelaksana Pembangunan Pedesaan	30
2.5	Sintesis Kajian Pustaka.....	30
2.5.1	Kerangka Teoritik.....	31
2.5.2	Variabel Penelitian.....	32
BAB III GAMBARAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI KABUPATEN		
TEMANGGUNG		
3.1	Kondisi Umum	34
3.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Temanggung	34
3.1.2	Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung	37
3.1.3	Kondisi Daerah Pedesaan di Kabupaten Temanggung	40
3.1.4	Gambaran Umum Kecamatan Kandangan dan Desa Kandangan	44
3.2	Kebijakan Pembangunan Pedesaan	46
3.2.1	Perkembangan Kebijakan Pembangunan di Indonesia	47
3.2.2	Kebijakan Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Temanggung	49
3.2.3	Kebijakan Pembangunan Pedesaan di Kecamatan Kandangan dan Desa Kandangan	56
BAB IV ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN		
PEDESAAN		
4.1	Analisis Peran Pemerintah sebagai Regulator dalam Pembangunan Pedesaan	59
4.1.1	Peran Pemerintah Kabupaten Sebagai Regulator dalam Pembangunan Pedesaan	59
4.1.2	Peran Pemerintah Kecamatan sebagai Regulator dalam Pembangunan Pedesaan	74
4.1.3	Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator dalam Pembangunan Pedesaan	78
4.2	Analisis Peran Pemerintah sebagai Pelaksana Pembangunan Pedesaan	80
4.2.1	Peran Pemerintah Kabupaten sebagai Pelaksana Pembangunan Pedesaan .	80
4.2.2	Peran Pemerintah Kecamatan sebagai Pelaksana Pembangunan Pedesaan .	87
4.2.3	Peran Pemerintah Desa sebagai Pelaksana Pembangunan Pedesaan	88
4.3	Posisi Level Pemerintah dalam Pembangunan Pedesaan	89
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	93

5.2 Rekomendasi	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	99

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan pedesaan merupakan daerah tempat tinggal sebagian besar penduduk di Indonesia. Hasil survei penduduk tahun 2006 menunjukkan 54% penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan, bahkan di pulau-pulau besar kawasan timur Indonesia seperti Maluku, Sulawesi, dan Papua penduduk yang masih bermukim di pedesaan masih di atas 70%, di mana penghidupan pokok mereka bersumber pada pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah pedesaan seperti pertanian, pekebunan dan lainnya (Rustiadi dan Pranoto, 2006: 22). Bagi mereka mempertahankan hidup sehari-hari saja sudah merupakan masalah pokok yang harus diatasi, hal ini dikarenakan gagalnya pembangunan pedesaan yang dilakukan, salah satu penyebabnya adalah terbatasnya sumber daya manusia yang terdapat di daerah pedesaan, serta terdapatnya ketimpangan pembangunan kota dan desa.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia ditandai dengan ketidakmerataan dan ketimpangan pembangunan terutama pembangunan di daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Daerah perkotaan ditandai dengan kemudahan mengakses informasi, fasilitas dan sebagai pusat perekonomian, sedangkan daerah pedesaan identik dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Akan tetapi, kenyataannya di tahun 1990an pedesaan tidak terpengaruh dengan adanya krisis ekonomi yang dilihat dari kondisi perekonomian pedesaan (Argo, 2005; Rustiadi dan Pranoto, 2007: 23). Hal ini menunjukkan bahwa daerah pedesaan memberikan kekuatan terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional dan pedesaan merupakan salah satu bagian penting yang dapat diperhatikan dalam menentukan arah pembangunan nasional.

Peran penting tersebut dikarenakan daerah pedesaan dapat menjadi tempat tumpuan mata pencaharian penduduk pedesaan, tempat konservasi lingkungan dan sumber daya alam seperti sumber mata air, keaneragaman hayati, tempat produksi dan distribusi pangan (Rustiadi dan Pranoto, 2007: 23). Sumber daya alam pedesaan merupakan aset yang sangat berharga dan strategis untuk menjamin kelestarian mata pencaharian masyarakat pedesaan yang pada gilirannya meningkatkan kehidupan ekonomi.

Pada dasarnya pembangunan berusaha untuk menciptakan peningkatan kualitas kehidupan dan ekonomi ke arah yang lebih wajar dari waktu ke waktu, demikian pula pembangunan pedesaan yang berusaha memberikan dan menciptakan peningkatan kehidupan masyarakat pedesaan berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki daerah pedesaan. Menurut *Office of Deputy Prime Ministry Republic of United Kingdom* (2004) untuk mewujudkan hal tersebut dapat

ditempuh melalui: (1) menjamin masyarakat mendapat tempat tinggal yang layak; (2) pertumbuhan ekonomi yang menerus membuat diversifikasi; dan (3) memberi perlindungan terhadap keterbukaan antara daerah pedesaan dan perkotaan (Rustiadi dan Pranoto, 2006: 24).

Banyak sumber yang menyatakan bahwa kondisi pedesaan digambarkan dengan aktivitas masyarakat yang sebagian besar bertumpu pada kegiatan berbasis sumber daya alam terutama pertanian. Namun, keunggulan yang dimiliki daerah pedesaan ini tidak serta merta menempatkan pedesaan tumbuh dan berkembang sejajar dengan daerah perkotaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan daerah pedesaan sulit untuk sejajar dengan perkotaan, yakni disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur (Rustiadi dan Pranoto, 2007:33). Namun, ada faktor yang lebih berpengaruh dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya daerah pedesaan yakni peran pemerintah, hal ini dikarenakan pemerintah memiliki kewenangan yang sifatnya pembuat kebijakan dan pelaksana program pembangunan pedesaan (Mardiasmo, 2003 dan Widjaja, 2005).

Penerapan otonomi daerah mendorong terjadinya perubahan dalam pelaksanaan pembangunan dan sistem pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Perubahan tersebut mempengaruhi terhadap kewenangan, fungsi dan kedudukan pemerintah dalam tatanan pemerintahan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut memberikan dampak dalam proses pembangunan pedesaan dan pelibatan pemerintah terutama pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa dalam mendorong pembangunan pedesaan. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten dan desa memiliki peranan khusus dalam mengatur urusan pemerintahannya sesuai amanat UU No. 32/2004. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pembangunan pedesaan merupakan pelaksanaan yang melibatkan tiap level pemerintah dimulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa. Oleh sebab itu peran masing-masing level pemerintah dalam pembangunan pedesaan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan pedesaan. Sehingga nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang mengalami dampak diberlakukannya UU No. 32/2004, yang mana pelaksanaan pembangunan pedesaan dengan melibatkan tiap level pemerintah dimulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa. Terkait dengan peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan, Kabupaten Temanggung sendiri telah banyak melakukan kegiatan pembangunan terutama dalam bidang pertanian dan prasarana pedesaan. Pembangunan dalam bidang pertanian dan prasarana pedesaan ini berupaya untuk mewujudkan peningkatan pembangunan pertanian sebagai sektor ekonomi basis dan penyediaan infrastruktur sebagai pendukung perekonomian daerah.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk mendorong pembangunan pedesaan pada dasarnya sudah banyak dilakukan dengan melakukan

banyak pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan dan penyuluhan pertanian dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia pedesaan. Puncak dari kegiatan pembangunan pedesaan ini di tahun 2004, yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung mengalokasikan APBD di tahun 2004 untuk program gerakan membangun dusun/ desa yakni sebesar 20,57 persen, pengalokasian ini merupakan terbesar kedua setelah anggaran untuk pendidikan. Anggaran ini diberikan dalam bentuk dana bantuan operasional kepada seluruh desa di Kabupaten Temanggung. Jumlah yang diterima setiap desa bervariasi, tergantung jumlah dusun, penduduk, dan luas lahan non hutan. Selain dalam bentuk dana bantuan operasional, program pembangunan dusun juga diperuntukkan bagi penyediaan sarana fisik di pedesaan, seperti penyediaan lampu dan pembuatan jalan (Kompas, 30 Januari 2004). Pembangunan pedesaan di Kabupaten Temanggung juga didukung dengan adanya program-program pembangunan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, salah satunya adalah kegiatan PNPM-Mandiri Desa dan PAMSIMAS.

PAMSIMAS merupakan program penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan yang berbasis pada masyarakat, program ini dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan air minum dan sanitasi. Pelaksanaan program ini menggunakan pendekatan yang berbeda dengan program infrastruktur lainnya, yakni dengan pendekatan yang tanggap akan kebutuhan masyarakat sebagai upaya menjamin sustainability dan efektif program, selain harus berbasis masyarakat agar program juga memiliki efektifitas biaya, maka pembangunan infrastruktur harus disertai upaya perubahan nilai dan perilaku hidup bersih masyarakat. Pelaksanaan PAMSIMAS dilakukan hanya beberapa desa saja di Kabupaten Temanggung dengan penilaian termasuk kedalam desa/ kelurahan miskin, desa/ kelurahan dengan prevalensi penyakit air yang tinggi, desa yang terbatas akses air minum dan sanitasi dan lebih diutamakan pada desa-desa yang belum mendapatkan proyek sejenis dalam 2 tahun terakhir.

PNPM-Mandiri Desa merupakan program pengembangan kecamatan yang lebih ditekankan pada pemberdayaan masyarakat pedesaan, kegiatan yang dilakukan PNPM-Mandiri Desa berupa kegiatan peningkatan sarana dan prasarana umum, pendidikan, serta kegiatan ekonomi pedesaan, seperti simpan pinjam. Kegiatan PNPM-Mandiri Desa di Kabupaten Temanggung dilaksanakan di 18 kecamatan sedangkan 2 kecamatan masuk kedalam PNPM-Mandiri Perkotaan.

Penjelasan di atas menyatakan bahwa pemerintah daerah Temanggung peduli akan pembangunan pedesaan, yang ditunjukkan dengan adanya alokasi APBD yang besar untuk mendorong program-program pembangunan pedesaan yang ada serta didukung program-program yang berasal dari pusat dan provinsi. Namun dalam penelitian ini ingin menilai bagaimana peran pemerintah pada tiap level pemerintah dimulai dari Kabupaten, Kecamatan dan desa dalam mendorong pembangunan pedesaan, apalagi dengan diberlakukannya otonomi daerah, tiap level pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur pembangunan di daerah otonomnya.

1.2 Perumusan Masalah

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu bagian integral dari pembangunan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya pembangunan pedesaan belum memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembangunan nasional, hal ini dapat dinilai dengan melihat taraf hidup masyarakat di daerah pedesaan yang masih jauh dari kondisi sejahtera. Keterlibatan tiap level pemerintah daerah menjadi unsur utama dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan dengan melihat dari instrumen kebijakan yang dikeluarkan. Ketetapan dan konsistensi kebijakan pemerintah daerah menjadi penyebab baik atau buruknya pelaksanaan pembangunan pedesaan di Kabupaten Temanggung.

Pembangunan pedesaan diarahkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki (SDM dan SDA). Kedua, untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antar sektor (perdagangan, pertanian, dan industri) antara desa, antar pedesaan dan perkotaan dan ketiga, untuk pembangunan nasional secara menyeluruh (Adisasmita, 2006: 12). Untuk mewujudkan itu semua diperlukan peran pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu kebijakan (Nasdian, 2008) dan hal ini diperkuat oleh Dye dan Subarsono (2005) yang menyatakan bahwa kebijakan itu merupakan segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan sebagai tugas utamanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah selain menetapkan dan memutuskan suatu kebijakan, pemerintah juga berperan dalam melaksanakan atau lebih tepat sebagai pelaksana pembangunan.

Peran pemerintah dalam mendorong pembangunan pedesaan dilakukan dengan menetapkan kebijakan yang tepat dan tindakan yang diwujudkan dengan program nyata pemerintah. Kebijakan dan pelaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah daerah bermuara pada tiga aspek pembangunan pedesaan, yakni terciptanya peningkatan sumber daya manusia pedesaan, peningkatan infrastruktur dan ekonomi pedesaan (Adisasmita, 2006; Wasistiono dan Tahir, 2006). Upaya tersebut pada dasarnya telah dilakukan oleh Kabupaten Temanggung, salah satunya meningkatkan alokasi APBD untuk gerakan membangun dusun/ desa.

Penelitian ini ingin menilai bagaimana peran pemerintah pada tiap level pemerintah dalam mendorong pembangunan pedesaan, apalagi dengan diberlakukannya otonomi daerah, tiap level pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur pembangunan di daerah otonomnya, seperti pemerintah desa memiliki peran dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarah kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan pembangunan. Sehingga nantinya terjawab pertanyaan penelitian "*bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan di Kabupaten Temanggung?*" apakah peran pemerintah masih terletak pada level kabupaten ataukah pada level yang lebih kecil yakni pemerintah desa.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penelitian ini yakni menganalisis peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sasaran yang ditempuh yakni

1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kebijakan dan program pembangunan pedesaan pada tiap level pemerintah;
2. menganalisis aspek-aspek kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan pedesaan;
3. menganalisis aspek-aspek tindakan pemerintah terkait dengan pembangunan pedesaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara praktis penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat terhadap stakeholder terkait dengan pengelolaan kewilayahan. Bagi pemerintah daerah hasil studi ini dapat memberikan gambaran terhadap peran pemerintahan dalam pembangunan pedesaan, sehingga dapat dijadikan masukan guna menciptakan efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan.

1.5 Ruang Lingkup

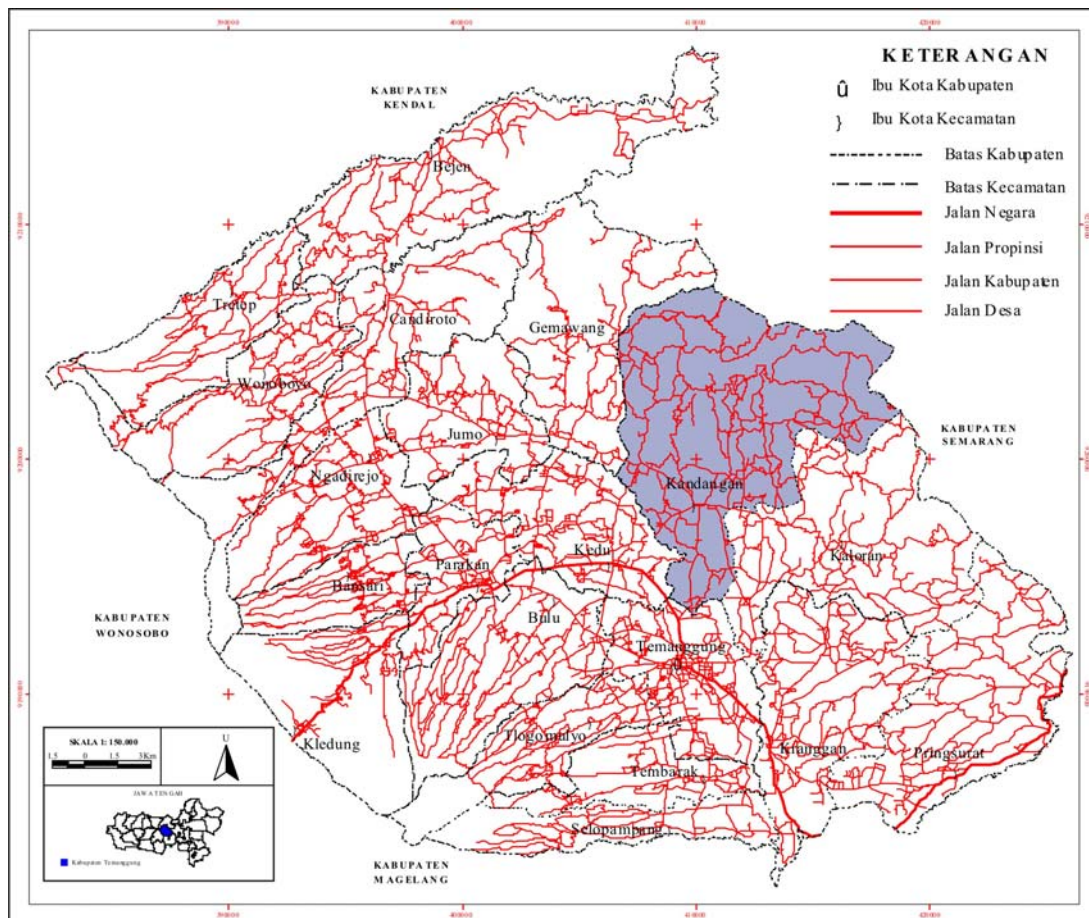
Ruang lingkup materi pada penelitian ini tertuju pada pengkajian mengenai peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan, peran pemerintah disini dinilai dari tiap level pemerintahan kabupaten, kecamatan, dan desa dalam konteks pembangunan pedesaan. Peran pemerintah disini diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah sebagai regulator dan upaya pemerintah sebagai pelaksana (tindakan) dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan.

Peran pemerintah sebagai regulator diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam membuat dan mewujudkan kebijakan, sedangkan peran pemerintah sebagai pelaksanaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk program atau kegiatan yang terkait dengan aspek pembangunan pedesaan yakni, terciptanya peningkatan sumber daya manusia pedesaan, peningkatan infrastruktur dan ekonomi pedesaan (Adisasmita, 2006; Wasistiono dan Tahir, 2006). Penelitian ini akan membatasi bidang pengkajian terhadap bidang pembangunan pedesaan, yakni lebih mengarah kepada bidang pertanian dan prasarana pedesaan.

Pembatasan penelitian peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan pada bidang pertanian dan prasarana pedesaan dikarenakan bidang pertanian sangat identik dengan daerah pedesaan sehingga regulasi dan tindakan berkaitan dengan bidang pertanian dan prasarana pedesaan yang telah dilakukan oleh masing-masing level pemerintah menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

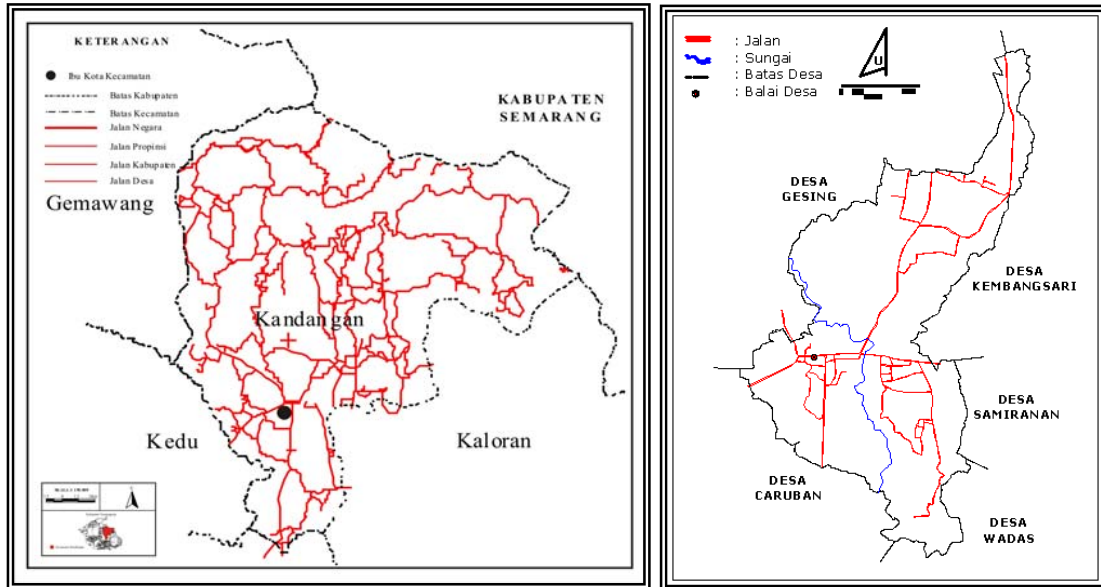
Kabupaten Temanggung kemudian diambil sebagai wilayah studi, terkait dengan peran pemerintah daerah berperan dalam melaksanakan kebijakan dan tindakan pembangunan pedesaan,

dimana pada tahun 2004 pengalokasian APBD untuk program gerakan membangun dusun/ desa. Untuk mengetahui peran pemerintah pada tiap level pemerintah, maka dipilih salah satu kecamatan di Kabupaten Temanggung yakni Kecamatan Kandangan dan unit wilayah terkecil yakni Desa Kandangan. Pemilihan Desa Kandangan dijadikan unit wilayah terkecil dengan pertimbangan yakni Desa Kandangan sebagian besar penduduknya masih berkerja pada bidang pertanian, yang kedua adalah Desa Kandangan juga menjadi salah satu desa yang menjadi sasaran program pembangunan pedesaan seperti PAMSIMAS dan PNPM-Mandiri Desa, yang ketiga yakni Desa Kandangan adalah Ibukota Kecamatan Kandangan sehingga dinilai Pemerintah Desa Kandangan memiliki kapasitas lebih jika dibandingkan dengan desa yang ada di Kecamatan Kandangan dalam hal ini mengakses informasi pembangunan pedesaan dan lainnya.



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung, 2008-2028

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Temanggung



Sumber : Kecamatan Kandangan, 2009

Gambar 1.2
Lokasi Penelitian Kecamatan Kandangan dan Desa Kandangan

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan peranan pemerintah dalam pembangunan pedesaan banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Pada penelitian ini lebih melihat peran pemerintah dari level kabupaten, kecamatan dan desa yang berada di Kabupaten Temanggung, selain itu metode yang dilakukan penelitian kali ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

TABEL 1.1
KEASLIAN PENELITIAN

No	Peneliti	Judul	Lokasi Penelitian	Metode	Lingkup Materi	Hasil
1	M. Imam Mahfudin, 1999	Peran Investasi Pemerintah Dalam Mengeliminasi Ketimpangan Antar Wilayah	Jawa Tengah	Pendekatan Kuantitatif	Peran Investasi Pemerintah Dalam Mengeliminasi Ketimpangan Antar Wilayah	Peran yang dilihat dari investasi pemerintah untuk mengurangi ketimpangan wilayah
2	Indra Cahyana, 2007	Peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Industri Kulit di Kabupaten Garut	Kabupaten Garut	Pendekatan kualitatif	Peran pemerintah dalam mengembangkan Industri Kulit yang berupa pemodalan, peningkatan SDM	Peran pemerintah yang dilihat dari pemodalan, peningkatan SDM, penerapan teknologi, akses pasar dan penciptaan iklim usaha
3	Heri Dwiyanto, 2009	Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pedesaan	Kabupaten Temanggung	Pendekatan campuran	Peran pemerintah dan pembangunan pedesaan	Mengkaji peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan yang dilihat dari regulasi dan tindakan pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan

Sumber : Analisis Penyusun, 2009

1.7 Kedudukan Penelitian

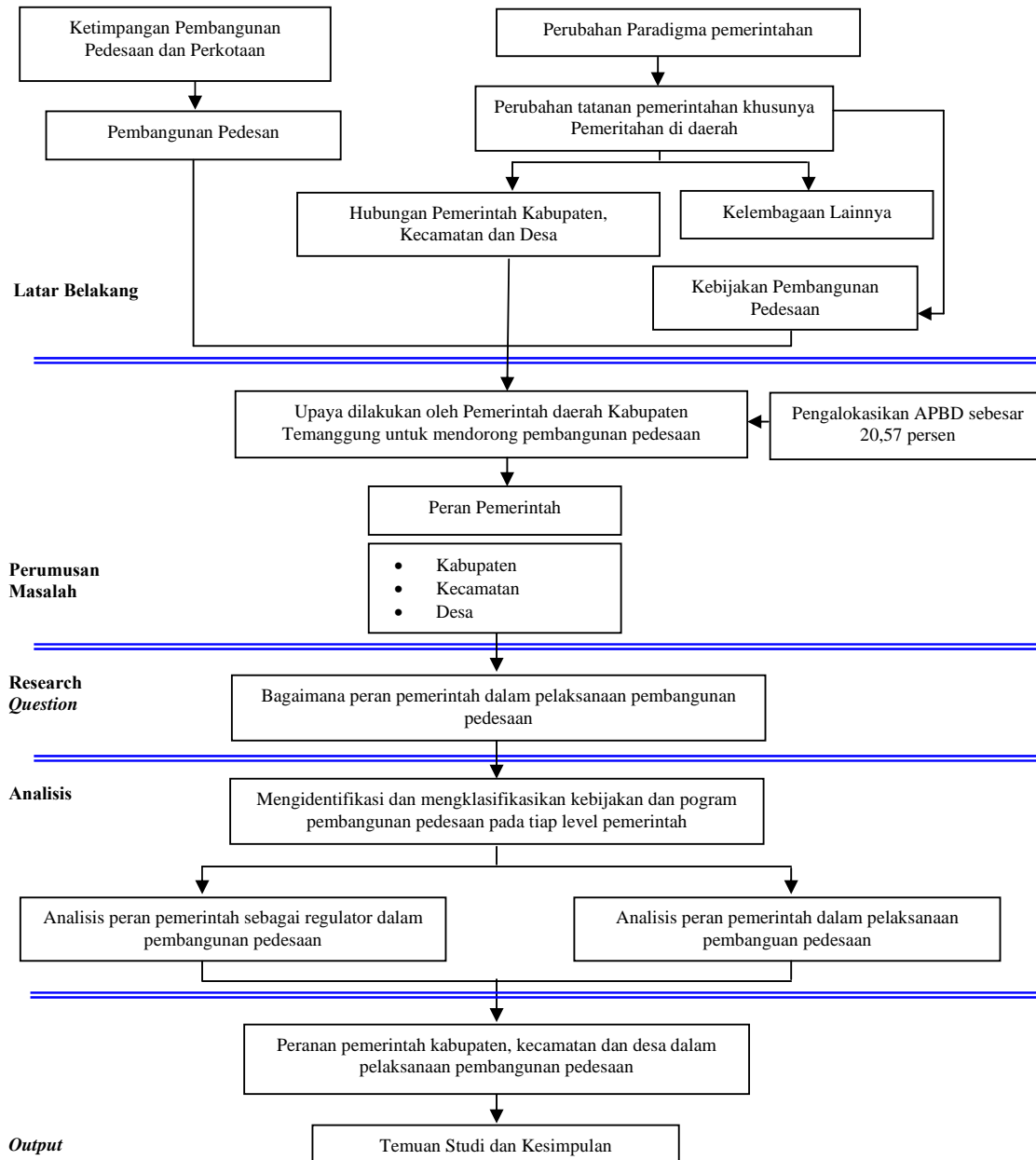
Perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses yang sinergis dan multisektor merupakan bagian dari bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota. Dalam konteks pembangunan daerah, maka perencanaan lebih cenderung mengarah pada perencanaan wilayah. Hal ini disebabkan karena kecenderungan yang terjadi, pembahasan mengenai pembangunan daerah lebih berorientasi pada pembangunan yang dimulai dari wilayah pedesaan.

Pembangunan wilayah bertujuan untuk memberikan keseimbangan pembangunan antar daerah yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada sehingga terciptanya efisiensi dan efektifitas (Riyadi, 2000), sehingga munculnya pembangunan perkotaan dan pedesaan untuk memberikan keseimbangan pembangunan. Namun, tujuan awal pembangunan wilayah yakni terciptanya pemerataan tidak berjalan seperti yang diharapkan, melainkan terjadinya ketimpangan pembangunan pedesaan dan perkotaan. Ketimpangan pembangunan tersebut terjadi mungkin dikarenakan kesalahan peran pemerintahan dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan dalam penelitian ini kabupaten, kecamatan dan desa dalam pembangunan terutama pembangunan pedesaan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berorientasi pada penelitian kebijakan dimana peran pemerintah menjadi obyek penelitian. Peran pemerintah yang diteliti yakni peran sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana dalam pembangunan pedesaan.

1.8 Kerangka Pikir

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya fenomena ketimpangan pembangunan terutama pada daerah perkotaan dan daerah pedesaan, kemudian terdapatnya perubahan paradigma pemerintahan, yakni dengan diberlakukannya UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan paradigma ini kemudian menyebabkan terjadinya perubahan kewenangan dan peran pemerintah di daerah terutama antar level pemerintah (kabupaten, kecamatan dan desa) yang memunculkan pertanyaan penelitian yakni *"bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan di Kabupaten Temanggung?"*. Untuk menilai peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan dilihat dari dua aspek yakni peran pemerintah sebagai regulator dan peran pemerintah sebagai pelaksana pembangunan pedesaan yang kemudian dianalisis menurut peran tersebut dan hasil dari analisis tersebut adalah posisi peran tiap level pemerintah dalam pembangunan pedesaan. Untuk lebih jelasnya lihat pada Gambar 1.3



Sumber : Analisis Penyusun, 2009

Gambar 1.3
Kerangka Pikir Penelitian Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pedesaan

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya berupaya untuk memaparkan peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan yang dapat dilihat dari level pemerintahan (kabupaten, kecamatan atau desa) yang dinilai dengan variabel yang terkait dengan terlibatnya pemerintah didalam

pembangunan pedesaan, dikarenakan penelitian ini mencoba untuk memaparkan dan memberikan penjelasan suatu keadaan maka penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian deskripsi yang memiliki ciri-ciri berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat ini; menguraikan variabel-variabel secara mendalam; serta variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan khusus terhadap variabel (Kountur, 2007: 108-109).

Berkaitan dengan penelitian ini yang mencoba menjelaskan peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan maka metode yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah campuran yakni gabungan dari metode kuantitatif dan kualitatif yang bersifat penelitian kualitatif dilakukan terlebih dahulu baru dilanjutkan penelitian kuantitatif untuk menggeneralisir hasil studi. Metode ini ditekankan pada proses analisis di mana berusaha untuk memaparkan tiga variabel yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya untuk melihat peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan. Metode ini dilakukan dalam setiap tahapan analisis yang dilakukan. Alasan penggunaan metode campuran adalah:

1. variabel yang ada memerlukan proses pemaparan dan menjelaskan lebih dalam berdasarkan telaah dokumen;
2. Teknik pengumpulan data yang semuanya dilakukan secara kualitatif yaitu survei institusional melalui telaah dokumen atau kebijakan, wawancara kepada narasumber dan observasi di wilayah studi;
3. mengkuantitatifkan hasil telaah dokumen dan data yang diperoleh sehingga dapat dinilai posisi peran pada tiap level pemerintah.

1.9.2. Kerangka Analisis

Kerangka analisis merupakan gambaran secara keseluruhan dalam penelitian ini. Dalam kerangka analisis ini dapat dilihat secara keseluruhan dari metode yang digunakan, variabel, proses sehingga nantinya didapatkan tujuan akhir dari penelitian ini. Hal ini dapat dilihat pada Tabel I.2.

TABEL I.2
KERANGKA ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN

Tujuan : Mengetahui peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan

No	Sasaran	Metode	Variabel	Hasil
1	Identifikasi dan mengklasifikasikan regulasi dan program pembangunan pedesaan pada tiap level pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Review dokumen kebijakan tentang pembangunan pedesaan • Wawancara Kepala Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas PU, Kecamatan dan Desa 	<p>1. Aspek regulasi dan program :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek Penduduk • Aspek Permukiman pedesaan • Aspek Prasarana jalan pedesaan • Aspek Fasilitas pelayanan umum (listrik dan air bersih), • Aspek Kegiatan produktifitas sector pertanian, • Pengembangan agribisnis dan agro industri, • Aspek Perkuat permasalahan, • Aspek Dukungan ketahanan pangan nasional (dalam system produksi dan distribusi), • Aspek Dukungan pengentasan kemiskinan, • Pengolahan SDA, pembangunan pengairan, konservasi dan rehabilitasi, • Pendidikan masyarakat, • Kesehatan masyarakat, • Kelembagaan, • Lingkungan pedesaan, • Teknologi, • Informasi, • Pemberdayaan masyarakat, • Partisipasi masyarakat, • Dukungan terhadap otonomi, • Pembangunan daerah pedesaan, • Peran pusat desa. 	Posisi peran tiap level pemerintah kebijakan dan program/ proyek tentang pembangunan pedesaan

No	Sasaran	Metode	Variabel	Hasil
			2. Tujuan regulasi dan program <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia • Peningkatan Infrastruktur Pedesaan • Peningkatan Ekonomi Pedesaan 	
2	Analisis aspek-aspek regulasi pemerintah terkait dengan pembangunan pedesaan;	<ul style="list-style-type: none"> • Skoring • Deskriptif kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Regulasi 2. Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia 3. Peningkatan Infrastruktur Pedesaan 4. Peningkatan Ekonomi Pedesaan 	Peran tiap level pemerintah dari aspek regulasi pembangunan pedesaan
3	Analisis aspek-aspek tindakan/ intervensi pemerintah terkait dengan pembangunan pedesaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Skoring • Deskriptif kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Regulasi 2. Program/ proyek pembangunan 3. Aparat pelaksana 4. Sumber dana 	Peran tiap level pemerintah dari aspek tindakan/ intervensi pembangunan pedesaan

Sumber : Analisis Penyusun, 2009

1.9.3. Data Penelitian

Data penelitian merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan sebagai dasar dalam pengambilan data selama survei. Adapaun dalam data penelitian ini akan dibahas obyek penelitian, jenis data dan cara pengumpulan data tersebut.

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian “Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Temanggung” ini terdiri dari 4 hal yaitu dokumen, dengan 2 variabel utama yang selalu digunakan yaitu kebijakan dan pelaksanaan.

a. Dokumen

Dokumen pemerintah yang dijadikan objek penelitian adalah dokumen yang berkaitan dengan dokumen kebijakan pembangunan pedesaan. Dokumen disini lebih kepada dokumen kebijakan dan program/ kegiatan pembangunan pedesaan.

b. Pelaku

Pelaku dalam obyek penelitian ini adalah orang atau institusi yang akan diteliti atau dimintai informasi terkait dengan pembangunan pedesaan. Bisa berasal dari pemerintahan yang dibedakan menjadi 3 level pemerintah yakni desa, kecamatan dan kabupaten. Untuk level pemerintahan desa akan diwakilkan oleh tokoh masyarakat/ kepala desa, untuk kecamatan akan diwakili oleh kepala kecamatan atau kepala bidang pembangunan dan untuk kabupaten akan di wakilkkan oleh kepala instansi terkait dengan pembangunan pedesaan yakni Bappeda, Dinas Pertanian dan PU. Pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelibatan tiap level pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan yang dapat dinilai dari kebijakan dan pelaksanaan.

2. Data dan Cara Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan dua cara yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer merupakan teknik yang dilakukan mendapatkan data yang berupa gambaran langsung mengenai apa yang akan diteliti dan memerlukan pemahaman lebih lanjut dari data yang dicari. Tujuan dari pengumpulan data primer adalah untuk mendapatkan data-data yang lebih ditekankan pada sifatnya *nonfisik* berupa pendeskripsian wilayah studi yang berkaitan dengan permasalahan sehingga dapat menambah informasi terkait dengan penguatan isu/ permasalahan yang terjadi di

wilayah studi tersebut. Data-data primer didapatkan dengan melakukan observasi langsung dilapangan. Kegiatannya meliputi :

- Pengamatan langsung di wilayah studi untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan pembangunan pedesaan dilapangan dan wawancara kepada masyarakat berkaitan dengan seberapa besar tingkat pelaksanaan yang dilakukan oleh tiap level pemerintahan.
- Wawancara dilakukan ke instansi pemerintahan sebagai pihak yang memiliki peran sebagai pembuat dan menetapkan kebijakan dan pelaksana kegiatan pembangunan pedesaan.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini merupakan teknik untuk mendapatkan data yang berupa literatur, teori dan kebijakan mengenai pelaksanaan pembangunan pedesaan. Data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan survei literatur dan survei institusional.

- Survei literatur, merupakan survei yang bersumber pada buku, jurnal, dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan.
- Survei institusional merupakan survei yang dilakukan ke instansi-instansi terkait dengan kegiatan pembangunan pedesaan, meliputi:
 - Pemda Kabupaten Temanggung bidang Pembangunan;
 - Bappeda Kabupaten Temanggung;
 - Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung;
 - Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung;
 - Kantor Kecamatan dan desa;
 - Serta instansi-instansi terkait dengan pembangunan pedesaan.

Secara keseluruhan, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data yang sifatnya kualitatif. Data-data tersebut berupa dokumen yang berupa kebijakan dan program, sedangkan untuk data hasil wawancara yang berisikan tentang pelaksanaan dan pengaruh dari diberlakukannya kebijakan dan program pembangunan pedesaan, yang terdiri atas tiga aspek yakni peningkatan sumber daya manusia pedesaan, peningkatan infrastruktur pedesaan dan peningkatan ekonomi pedesaan. Data hasil wawancara bersumber langsung dari responden penelitian. Adapun kebutuhan data penelitian ini dapat dilihat pada Tabel I.3

TABEL I.3
DATA PENELITIAN

No	Nama Data	Jenis Data	Bentuk Data	Tahun	Sumber Data
1	Peraturan Daerah tentang pembangunan pedesaan	Primer dan sekunder	Dokumen Deskripsi	Terbaru	PEMDA
2	Peraturan Kecamatan tentang pembangunan pedesaan	Primer dan sekunder	Dokumen Deskripsi	Terbaru	Kecamatan
3	Peraturan Desa/ adat tentang pembangunan pedesaan	Primer dan sekunder	Dokumen Deskripsi	Terbaru	Desa
4	Kebijakan dan program peningkatan SDM pedesaan	Primer dan sekunder	Dokumen Deskripsi	Terbaru	RPJM Kab, RPJMDes dan Bappeda, Kecamatan, Desa dan Dinas terkait
5	Kebijakan dan program peningkatan infrastruktur pedesaan	Primer dan sekunder	Dokumen Deskripsi	Terbaru	RPJM Kab, RPJMDes dan Bappeda, Kecamatan, Desa dan Dinas terkait
6	Kebijakan dan program peningkatan ekonomi pedesaan	Primer dan sekunder	Dokumen Deskripsi	Terbaru	RPJM Kab, RPJMDes dan Bappeda, Kecamatan, Desa dan Dinas terkait
7	Aparat Pelaksana Program/ proyek Pembangunan Pedesaan	Primer dan sekunder	Dokumen Deskripsi	Terbaru	RPJM Kab, RPJMDes dan Bappeda, Kecamatan, Desa dan Dinas terkait
8	Sumber Dana Program/ proyek Pembangunan Pedesaan	Primer dan sekunder	Dokumen Deskripsi	Terbaru	RPJM Kab, RPJMDes dan Bappeda, Kecamatan, Desa dan Dinas terkait

Sumber : Analisis Penyusun, 2009

1.9.4. Analisis Data

Data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan data di atas, kemudian masuk ke dalam proses selanjutnya hingga data tersebut dapat dianalisis dan diinterpretasikan serta dapat diambil kesimpulan.

1. Kompilasi Data

Sebelum memulai tahapan analisis data-data yang diperoleh akan dikompilasi data, dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengambilan informasi dan kesimpulan yang bersumber dari berbagai sumber data. Langkah pertama yang akan dilakukan dalam pengkompilasian data yang ada adalah dengan membedakan data menurut sumber data yang diperoleh (wawancara, dokumentasi lapangan dan dokumen), setelah dekompilasikan menurut sumber data langkah kedua adalah dengan cara mengelompokkan data tersebut kedalam Tabel data peran pemerintah.

TABEL I.4
KOMPILASI DATA PERAN PEMERINTAH

Sumber data	Level Pemerintah		
	Kabupaten	Kecamatan	Desa
Wawancara			
Dokumen			
Dokumentasi lapangan			

Sumber : Analisis Penyusun, 2009

Setelah data yang terkumpul pada Tabel data peran pemerintah, adanya pengecekan ulang data yang diperlukan atau tidak diperlukan, jika data tersebut tidak diperlukan maka data tersebut akan dihilangkan.

2. Proses Analisis

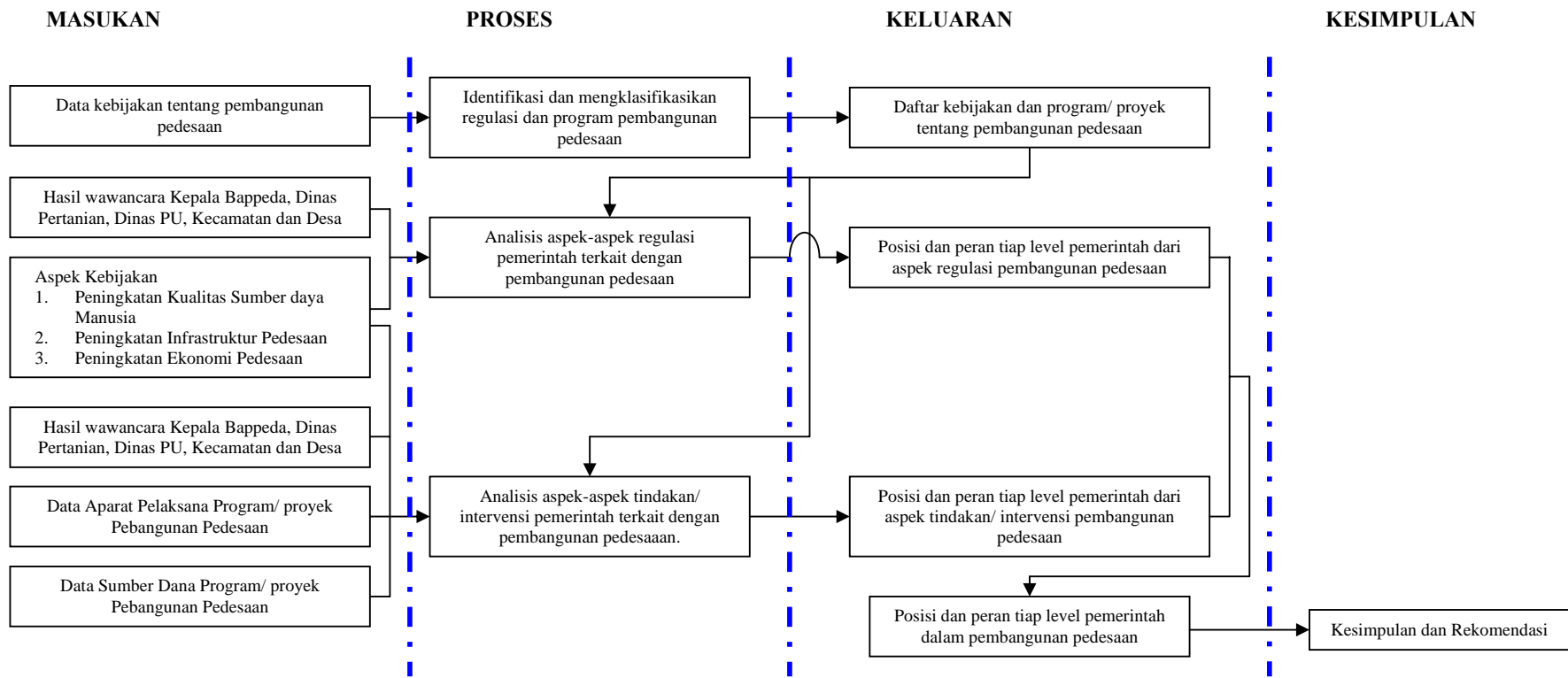
Setelah mendapatkan data dan dikompilasi langkah selanjutnya adalah proses analisis. Proses analisis ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan menarik kesimpulan, untuk memperoleh informasi dan menarik kesimpulan tersebut kegiatan yang dilakukan adalah :

a. Analisis aspek-aspek regulasi pemerintah terkait dengan pembangunan pedesaan

Pada dasarnya pemerintah memiliki 2 peran dalam pembangunan pedesaan yakni bersifat pembuat kebijakan dan sebagai pelaksana. Peran pemerintah bersifat pembuat kebijakan dapat dinilai dengan melihat ada atau tidak ada kebijakan pembangunan pedesaan dan seberapa besar kekuatan peraturan/ kebijakan yang dibuat dalam pembangunan pedesaan. Analisis ini dilakukan atas dasar data-data yang diperoleh dari hasil pengambilan data primer maupun sekunder berupa dokumen kebijakan pembangunan serta hasil wawancara dari setiap level pemerintah untuk mengemukakan seberapa besar dokumen kebijakan pembangunan tersebut memiliki kekuatan dalam mendorong pembangunan pedesaan yang dirinci tiap level pemerintahan. Hasil analisis ini berupa seberapa besar peran pemerintah dalam mendorong pembangunan pedesaan yang dilihat dari produk kebijakannya.

b. Analisis aspek-aspek pelaksanaan program pemerintah terkait dengan pembangunan pedesaan.

Analisis aspek implementasi program pembangunan pedesaan ini untuk melihat peran tiap level pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pedesaan. Analisis aspek-aspek implementasi program pemerintah dalam pembangunan pedesaan ini terdapat 3 variabel kunci yakni adanya dokumen program/ proyek pembangunan pedesaan yang dilaksanakan, kedua adalah aparat/ badan pelaksana pembangunan tersebut, dan ketiga adalah sumber dana program/ proyek pembangunan pedesaan. Untuk lebih jelas proses analisis dapat dilihat pada Gambar I.4.



Sumber: Analisis Penyusun, 2009

Gambar 1.4
Proses Analisis

3. Teknik Analisis

Teknik analisis digunakan untuk mempermudah menginterpretasi data sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah peran tiap level pemerintah dalam pembangunan pedesaan. Untuk mencapai hasil yang diharapkan terkait dengan teknik analisis yang digunakan, beberapa teknik analisis dalam penelitian ini adalah telaah dokumen, komparasi dan akhirnya bermuara pada teknik analisis pengukuran sebagai pengambilan kesimpulan. Adapun teknik analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Telaah dokumen

Telaah dokumen dilakukan untuk dokumen yang berupa kebijakan atau peraturan daerah yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan, adapun dokumen tersebut diantaranya :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang pembangunan terutama pembangunan pedesaan;
- b. Peraturan Desa tentang pembangunan pedesaan;
- c. kebijakan-kebijakan lainnya tentang pembangunan pedesaan yang lebih mengarah pada terwujudnya :
 - i. peningkatan sumber daya manusia pedesaan;
 - ii. peningkatan infrastruktur pedesaan;
 - iii. peningkatan ekonomi pedesaan;
- d. Program-program pembangunan pedesaan.

Dari masing peraturan dan kebijakan tersebut ditelaah bagaimana sebenarnya kebijakan/peraturan tersebut mampu mendorong pembangunan pedesaan, yang kemudian dibandingkan dengan kebijakan pada level pemerintahan yang berbeda sehingga diketahui peran sebagai pembuat dan menetapkan kebijakan pada tiap level pemerintah. Cara menelaah dokumen ini dilakukan dengan melihat kebijakan yang dikeluarkan pada tiap level pemerintahan dengan kriteria-kriteria regulasi yang didapatkan dari kajian literatur lihat pada Tabel I.5.

b. Pengukuran (Skoring)

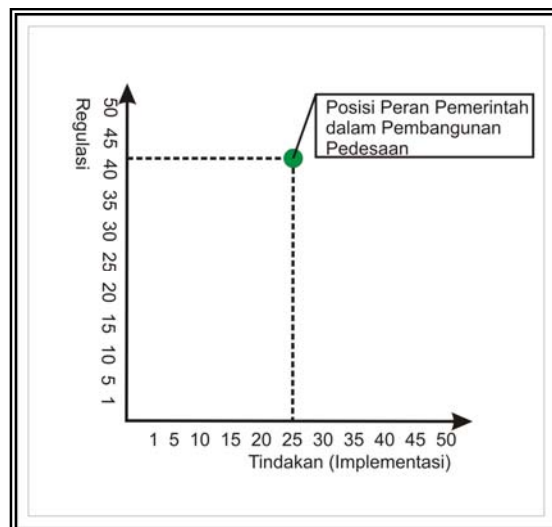
Teknik pengukuran ini merupakan muara dari teknik analisis sebelumnya, sehingga nantinya didapat kesimpulan yakni posisi peran pemerintah terhadap pembangunan pedesaan. Teknik ini berhubungan dengan tingkat peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan. Teknik ini nantinya diharapkan dapat membuat tingkatan peran pemerintah menurut level pemerintah. Ketentuan skoring ini dinilai dari kelengkapan kebijakan dan program yang dikeluarkan pada tiap level pemerintah sesuai dengan kriteria pembangunan pedesaan yang ada.

TABEL I.5
SKORING LEVEL PEMERINTAH

No	Aspek	Strategi Kebijakan	Cek List (√)	Skor Ada = 1 Tidak = 0	Regulasi atau Program Pembangunan Pedesaan yang Dikeluarkan	Sumber
1	Penduduk	• Mengurangi migrasi keluar				
		• Meningkatkan ketrampilan penduduk				
		• Memberdayakan penduduk				
2	Permukiman pedesaan	• Memperbaiki kualitas permukiman				
		• Mengurangi jarak penyebaran permukiman				
3	Aspek.....	•				
4	Aspek.....	•				
Jumlah						

Sumber : Analisis Penyusun, 2009

Setelah dibuat tabel skoring menurut level pemerintahan, langkah selanjutnya adalah membuat grafik peran pemerintahan dalam pembangunan pedesaan, yang nantinya dapat membantu dalam pengambilan kesimpulan, seperti terlihat dalam Gambar I.4.



Sumber : Analisis Penyusun, 2009

Gambar 1.5
Posisi Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pedesaan

Peran pemerintah dinilai tinggi jika memiliki skor nilai 24-47 (skor maksimal) sedangkan jika nilai skor terdapat pada nilai 1-24 dapat dikatakan tiap level pemerintah cukup berperan dalam pembangunan pedesaan dan jika nilai skor 0 dapat diartikan tidak memiliki peran dalam pembangunan pedesaan baik dalam bentuk peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan yang

ditandai dengan adanya dokumen kebijakan maupun sebagai pelaksana pembangunan pedesaan yang ditandai dengan adanya dokumen program pembangunan pedesaan. Namun, hasil skoring yang dilakukan tidak langsung diterima sebagai kesimpulan, tetapi juga didukung pertimbangan analisis deskriptif sebagai penguat dari hasil pengklasifikasi peran pemerintah.

1.10 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi kedalam bab-bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang yakni suatu hal yang membuat penulis tertarik akan tema penelitian ini yang kemudian didukung oleh permasalahan yang berkembang yang terangkum pada perumusan permasalahan, bab I ini juga berisikan tujuan dan sasaran penelitian, keaslian, posisi penelitian dan kerangka pemikiran yang kesemuanya merupakan dasar dan pedoman dalam proses pelaksanaan penelitian ini serta cara penelitian ini dilakukan yang diawali pendekatan penelitian yang dipilih, metode penelitian, data penelitian, cara pengambilan data, hingga sampai cara menganalisis data tersebut. Konsep teoritis maupun normatif yang berkenaan dengan peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan tertuang pada bab II yang dirangkum dalam kajian literatur.

Dalam bab III akan dijelaskan sejumlah paparan tentang wilayah Kabupaten Temanggung dan berkenaan dengan unit wilayah terkecil, yang meliputi aspek karakteristik wilayah, kependudukan, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan wilayah dan tema penelitian ini. Pembahasan selanjutnya analisis peran level pemerintah dalam pembangunan pedesaan yang tertuang pada bab IV. Pada bab V ini akan berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini.